

# TRAKTAT LISBON DAN PERLINDUNGAN ETNIS ROMA DI REPUBLIK CEKO

## *Lisbon Treaty and Protection of Roma Ethnicity in Czech Republic*

**Deni Iwan Dahlan, Sri Yuniati, Adhiningasih P.**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: [deniidahlan@gmail.com](mailto:deniidahlan@gmail.com), [s.yuniati@rocketmail.com](mailto:s.yuniati@rocketmail.com), [adh1n1n6@gmail.com](mailto:adh1n1n6@gmail.com)

### Abstract

*Discrimination against Roma ethnicity is a violation of Czech Republic to the European Convention on Human Rights in the Lisbon Treaty. The discrimination may undermine the integrity of the EU, so that EU should also play a role in eliminating discrimination. EU uses its authority and legality by giving a warning to Czech Republic that discrimination has violated the European Convention on Human Rights. In addition, the EU also recommended that the Czech Republic make up the program Strategy for Combating Social Exclusion. In the end, Czech Republic made the program based on the Government Resolution Number 462. The purpose of this study was to determine the implementation of the Lisbon Treaty in protecting Roma ethnicity in Czech Republic. The study used a qualitative research method that is used to describe how Czech Republic discriminates Roma ethnicity in recent years and how the Lisbon Treaty protects Roma ethnicity. The study concluded that the implementation of the Lisbon Treaty in protecting ethnic Roma was to use the authority and the legality of the EU to control the behavior of the state of Czech Republic.*

*Keywords: roma ethnicity, discrimination, Czech republic, lisbon treaty.*

### **A. PENDAHULUAN**

Republik Ceko telah mendiskriminasi etnis Roma sejak Perang Dunia ke-II. Penyiksaan etnis Roma di kamp konsentrasi, pembantaian wanita etnis Roma pada tahun 1978, pembatasan partisipasi politik etnis Roma dalam Parlemen Republik Ceko merupakan beberapa bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah maupun warga sipil Republik Ceko terutama dari

kalangan partai WPSS (*Workers Party of Social Solidarity*). (ODIHR, 2012)

Diskriminasi adalah bentuk perlakuan tidak seimbang terhadap seseorang atau kelompok yang didasarkan pada atribut khas seperti warna kulit, gender, ras, agama, atau atribut lainnya. (Theodorson dan Theodorson, 1979: 115) Etnis Roma mengalami diskriminasi hampir di seluruh negara-negara Eropa. Pengusiran warga etnis Roma di Rumania, Prancis, dan Italia sering

terjadi. (Sinaga, 2015: 1). Sedangkan diskriminasi yang dilakukan Republik Ceko terhadap etnis Roma salah satunya adalah segregasi murid etnis Roma ke dalam sekolah khusus. Diskriminasi tersebut akhirnya mendapat perhatian dunia internasional ketika sebanyak 18 murid etnis Roma yang didampingi oleh *European Roma Rights Centre* (ERRC) mengajukan tuntutan hukum kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Mereka memprotes kebijakan Pemerintah Republik Ceko yaitu segregasi murid etnis Roma ke dalam sekolah khusus pada tahun 2000. (ODIHR, 2012)

Hasil sidang pada tahun 2007 memutuskan bahwa kebijakan segregasi yang dilakukan Republik Ceko tersebut merupakan bentuk diskriminasi. Pengadilan menyatakan bahwa Republik Ceko telah melanggar Pasal 14 (larangan untuk diskriminasi) dan Pasal 2 Protokol 1 (akses pendidikan yang merata bagi semua warga UE tanpa terkecuali), dan meminta Republik Ceko untuk segera mengakhiri diskriminasi tersebut. (ODIHR, 2012)

Namun diskriminasi masih terus berlanjut sampai Republik Ceko meratifikasi Traktat Lisbon pada tahun 2009. Di dalam Traktat Lisbon terdapat Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang memuat pasal-pasal yang mengharuskan Republik Ceko harus menghormati hak-hak asasi warganya tanpa terkecuali termasuk etnis Roma. Walaupun demikian, Republik Ceko masih menerapkan kebijakan segregasi murid etnis Roma ke dalam sekolah khusus. Pemerintah Republik Ceko juga menerapkan tes standarisasi untuk murid kelas 5

dan 9 yang merugikan murid-murid etnis Roma. Kebijakan tersebut merugikan murid-murid etnis Roma yang belajar di sekolah khusus karena tidak mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Republik Ceko karena tidak memiliki prestasi. (Council of Europe, 2012b) Padahal, kebijakan pendidikan dan pembiayaan pendidikan sepenuhnya merupakan kewajiban dari Pemerintah Republik Ceko. (Perhimpunan Pelajar Indonesia, 2012: 20)

Pemaparan data di atas menunjukkan bahwa Republik Ceko masih terus mendiskriminasi etnis Roma sehingga dibutuhkan intervensi dari UE untuk menghapus praktek diskriminasi tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya membutuhkan bantuan UE, tetapi kemauan dan upaya Republik Ceko untuk melindungi hak-hak etnis Roma jauh lebih penting sehingga dibutuhkan kerjasama antar kedua pihak.

Dari latar belakang yang telah diutarakan, maka tulisan ini akan menganalisis tentang bagaimana Traktat Lisbon dapat mengidentifikasi diskriminasi etnis Roma di Republik Ceko dan bagaimana UE mengontrol Republik Ceko agar berhenti mendiskriminasi etnis Roma dan menjunjung hak-hak asasi mereka.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dalam Traktat Lisbon

Traktat adalah perjanjian internasional yang melibatkan banyak negara dalam bentuk tertulis dan dipimpin oleh hukum internasional, dan dapat ditambah dengan peraturan tambahan yang sesuai

dengan isi traktat. (Aust, 2007: 2) Sebuah traktat dapat menambah instrumen lain ke dalam traktat tersebut untuk memperkuat ketentuan yang dikehendaki. Dalam konteks tersebut, Traktat Lisbon telah mengadopsi Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Konvensi tersebut merupakan suatu instrumen lain yang dimuat dalam Traktat Lisbon. Tujuan dari pengadopsian instrumen tersebut adalah untuk lebih menjunjung tinggi hak-hak kelompok minoritas seperti etnis Roma sehingga terjadi kesetaraan di antara masyarakat UE yang majemuk. Konvensi tersebut memiliki enam prinsip utama yaitu *dignity (harga diri)*, *freedoms (kebebasan)*, *equality (kesetaraan)*, *solidarity (solidaritas)*, *rights linked to citizenship status (hak untuk mendapatkan kewarganegaraan)* dan *justice (keadilan)*. (Council of Europe, 2002a)

Berikut adalah beberapa pasal yang mewakili tiap prinsip:

1. Pasal Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang mewakili prinsip harga diri adalah Pasal 14 Bagian 1.
2. Pasal Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang mewakili prinsip kebebasan adalah Pasal 10 Bagian 1.
3. Pasal Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang mewakili prinsip kesetaraan adalah Pasal 2 Protokol 1.
4. Pasal Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang mewakili prinsip solidaritas adalah Pasal 11 Bagian 1.

5. Pasal Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang mewakili prinsip hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan adalah Pasal 2 Protokol 4.
6. Pasal Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang mewakili prinsip keadilan adalah Pasal 3 Bagian 1.

Keenam pasal tersebut merupakan alat untuk melihat diskriminasi etnis Roma yang terjadi di Republik Ceko.

## 2. Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi kebijakan terdiri dari dua variabel, yaitu *Institutional Resources* dan *Domestic Levels*. *Institutional resources* menekankan pada peran organisasi internasional (dalam konteks ini UE) dalam mengimplementasikan hukum Traktat Lisbon yang menjunjung hak-hak kelompok minoritas. *Institutional resources* terdiri dari tiga pendekatan, yaitu *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach*. (Joachim, et al, 2008: 9)

*Enforcement approach* merupakan bentuk pernyataan bersalah dari UE kepada Republik Ceko terkait kebijakan segregasi murid etnis Roma ke dalam sekolah khusus. Sedangkan *management approach* lebih memberikan solusi dengan membentuk tim ahli, mengobservasi dan membuat saran terkait pembentukan program SCSE. *Normative approach* menekankan penggunaan otoritas dan legalitas yang dimiliki UE untuk mengontrol perilaku negara Republik Ceko agar lebih mempedulikan hak-hak dasar etnis Roma.

Sedangkan variabel kedua yaitu *domestic levels* mengasumsikan bahwa suatu implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari kebijakan institusinya saja tetapi juga lebih melibatkan peran negara anggota. (Joachim, et. al, 2008: 13) Peranan dari Republik Ceko mutlak diperlukan karena sebaik apapun konsep kebijakan yang dibuat oleh UE tapi kalau Republik Ceko tidak mampu menerapkannya sesuai rencana yang telah dibuat maka implementasi kebijakan tersebut bisa terhambat. Artinya, suatu konsep kebijakan tidak akan berguna jika tidak ada tindakan lanjut untuk mengimplementasikan konsep kebijakan tersebut ke dalam kehidupan riil suatu negara. (Udoji, 1981: 32) Oleh karena itu, di dalam mengatasi diskriminasi etnis Roma, Republik Ceko telah berperan dengan membentuk program kebijakan sesuai saran dari UE yaitu SCSE berdasarkan Government Resolution Nr. 462 yang dikeluarkan pada 14 Juni 2010. (Office of the Government of the Czech Republic, 2011)

Jika diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu negara merespons implementasi kebijakan yang telah dibuat. Faktor pertama adalah norma yang ada di negara itu. Norma dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai baik yang dianut oleh suatu negara. Norma digunakan untuk mencapai kondisi bernegara dan bermasyarakat yang lebih ideal. Namun pada kenyataannya, norma sering kali berbenturan dengan sifat alami manusia yaitu lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada orang lain sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi suatu

negara ditentukan oleh *altruism* melawan *selfishness*. (Shannon, 2000: 294) Banyak dari norma internasional berawal dari norma domestik yang dibawa oleh para penegak norma (*norms entrepreneur*), kemudian berkembang menjadi norma internasional. (Finnemore dan Sikkink, 1998: 893)

Dengan demikian, semakin baik norma di suatu negara maka semakin besar kecenderungan untuk mematuhi kebijakan organisasi internasional. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Sebagai contoh, sebanyak 59% warga sipil di Republik Ceko merupakan *atheis*.<sup>1</sup> Para penganut *atheis* tersebut tentu tidak mengenal konsep surga-neraka, pahala-dosa, atau kebaikan-keburukan. Mereka yakin bahwa hidup hanya di dunia ini saja, berbeda dengan orang-orang yang memiliki agama dan keyakinan dimana mereka yakin akan adanya kehidupan selanjutnya setelah kehidupan di bumi ini. Perspektif *atheis* tersebut yang menambah buruk masalah. Penduduk Republik Ceko jadi tega dan tidak segan-segan mengusir, menyiksa, melempari batu dan bom, bahkan sampai membunuh warga etnis Roma.

Secara tidak langsung, *atheisme* tersebut mengurangi kepatuhan Republik Ceko dalam menghormati hak asasi manusia etnis Roma yang merupakan kewajiban semua negara anggota UE. Selain norma, faktor lainnya adalah intitusi di suatu negara itu sendiri. Republik Ceko, sebagai negara

<sup>1</sup>Pernyataan A. Guntur Setiawan (pejabat KBRI Praha) dalam kuliah umum "*Dari Kampus Tegalboto ke Mancanegara*" di Universitas Jember pada tanggal 23 Mei 2014.

demokrasi, memiliki badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menjalankan pemerintahannya. Ketiganya harus *check and balance* agar demokrasi dapat terwujud dengan baik.

Di dalam proses pembuatan kebijakan itu terkadang berjalan dengan tidak mudah, karena terdapat perbedaan visi dan misi (kepentingan) tiap institusi sehingga proses pengambilan keputusan berjalan rumit. Terlebih lagi, peran pemerintah pusat (presiden atau perdana menteri) merupakan representatif akhir yang berwenang mewakili kepentingan nasional di tingkat internasional, sehingga jika kebijakan organisasi internasional tidak sesuai dengan visi pemerintah maka akan terjadi konflik kepentingan yang berujung kepada pemberontakan negara. (Putnam, 1988: 430)

Contohnya ketika Republik Ceko memutuskan untuk menanggukkan ratifikasi Traktat Lisbon selama 2 tahun karena Presiden Vaclav Klaus tidak ingin pasal dalam Traktat Lisbon tentang hak kepemilikan pribadi disalahgunakan oleh warga Jerman untuk menuntut pengembalian properti yang dirampas pasca Perang Dunia II. Contoh tersebut menegaskan bahwa suatu institusi dalam negara dapat mempengaruhi sebuah kebijakan internasional.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis permasalahan tentang bagaimana implementasi Traktat Lisbon dalam melindungi etnis Roma di Republik Ceko, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari perpustakaan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Perpustakaan Pusat Universitas Jember, buku literatur dan situs-situs internet. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

### D. HASIL PENELITIAN

#### 1. Diskriminasi Republik Ceko terhadap Etnis Roma Ditinjau dari 6 Prinsip Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa

Praktek diskriminasi yang terjadi di Republik Ceko merupakan fenomena yang bertentangan dengan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang termuat dalam Traktat Lisbon. Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang merupakan instrumen hukum tambahan diadopsi ke dalam Traktat Lisbon sehingga UE lebih menjunjung tinggi isu hak asasi manusia terutama kelompok minoritas. Jika dilihat dari prinsip-prinsip Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (yaitu *dignity, freedom, equality, solidarity, rights linked to citizenship status dan justice*), Republik Ceko telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah pasal, diantaranya:

##### a. Pelanggaran Republik Ceko terhadap prinsip *dignity*

Penyiksaan 6.000 warga etnis Roma ke kamp konsentrasi pada zaman Perang Dunia ke-II, pembantaian wanita etnis Roma pada 1978, aksi demonstrasi mengusir etnis Roma dari Republik Ceko, pelemparan batu dan bom molotov merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan Republik Ceko terhadap etnis Roma. Diskriminasi tersebut melanggar prinsip *dignity* terkait larangan untuk mendiskriminasi (Pasal 14 Bagian 1) di

dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, yang menyatakan bahwa Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa menjamin hak asasi setiap warganya untuk hidup dengan aman tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, opini, kebangsaan, kelompok minoritas, kelahiran atau status lainnya.

#### **b. Pelanggaran Republik Ceko terhadap prinsip *freedom***

Adanya kebijakan untuk tidak mengintegrasikan Bahasa Romani (bahasa etnis Roma) ke dalam kurikulum sekolah khusus yang mayoritas muridnya adalah etnis Roma, merupakan bentuk diskriminasi Republik Ceko yang bertentangan dengan Pasal 10 Bagian 1 terkait kebebasan untuk berekspresi, yang menyatakan bahwa Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa menjamin setiap warganya untuk memberi dan menerima informasi tanpa gangguan oleh pihak lain.

#### **c. Pelanggaran Republik Ceko terhadap prinsip *equality***

Pendidikan sekolah reguler di Republik Ceko tidak dapat dinikmati oleh semua warga karena ada kelompok etnis minoritas yang mendapat diskriminasi yaitu etnis Roma. Sebanyak lebih dari 50% murid etnis Roma dimasukkan ke dalam sekolah khusus. (Stubbs, 2008: 81)

Kasus penempatan murid etnis Roma ke dalam sekolah khusus merupakan diskriminasi Republik Ceko yang bertentangan dengan Pasal 2 Protokol 1 yang menyatakan bahwa negara anggota UE harus memberikan pendidikan secara

merata untuk semua orang terlepas dari latar belakang orang tuanya dan faktor lainnya.

#### **d. Pelanggaran Republik Ceko terhadap prinsip *solidarity***

Adanya pembatasan partisipasi politik etnis Roma oleh Pemerintah Republik Ceko merupakan bentuk pelanggaran Republik Ceko terhadap Pasal 11 Bagian 1, yaitu kebebasan semua warga UE untuk ikut dalam suatu organisasi.

#### **e. Pelanggaran Republik Ceko terhadap prinsip *rights linked to citizenship status***

Kebijakan penolakan Republik Ceko terkait pengembalian imigran etnis Roma dari Kanada pada tahun 2012 adalah bentuk pelanggaran Republik Ceko terhadap Pasal 2 Protokol 4 terkait hak untuk pindah dan memilih kewarganegaraan bagi setiap warga negara UE.

#### **f. Pelanggaran Republik Ceko terhadap prinsip *justice***

Penerapan tes standardisasi yang merugikan murid etnis Roma di sekolah khusus, pembangunan tembok pemisah dan kualitas tempat tinggal yang buruk merupakan bentuk pelanggaran Republik Ceko terhadap prinsip *justice*. Republik Ceko telah melanggar pasal terkait *justice*, yaitu larangan untuk penyiksaan (Pasal 3 Bagian 1) yang menyatakan bahwa tidak boleh ada penyiksaan atau kekejaman yang ditujukan kepada seorang warga negara UE.

## **2. Implementasi Kebijakan Traktat Lisbon dalam Mengatasi Diskriminasi Etnis Roma di Republik Ceko**

Sebagai organisasi supranasional yang menaungi Republik Ceko, maka otomatis UE akan terkena dampak akan adanya praktek diskriminasi etnis Roma di Republik Ceko. Dampak tersebut salah satunya adalah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa UE telah gagal dalam melindungi hak asasi etnis Roma yang membuat konsep integrasi UE perlu dikaji ulang.

Diskriminasi etnis Roma di Republik Ceko juga bisa memicu ketegangan dan konflik yang luas yang berujung kepada *xenophobia*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika diskriminasi tersebut dibiarkan terjadi terus-menerus tanpa adanya usaha untuk mengatasinya maka akan merusak persatuan UE secara tidak langsung.

Oleh karena itu, peranan institusi sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan suatu organisasi internasional. Intervensi dari pihak UE sebagai organisasi yang menaungi Republik Ceko mutlak diperlukan dalam melindungi hak-hak dasar etnis Roma. Intervensi tersebut terdiri dari 3 pendekatan, yaitu:

### **1. Enforcement approach**

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang memutuskan bahwa Republik Ceko dinyatakan bersalah karena telah menempatkan murid-murid dari etnis Roma ke dalam sekolah khusus. Segregasi tersebut melanggar Pasal 14 terkait larangan untuk mendiskriminasi dan Pasal 2 Protokol 1 terkait hak setiap warga negara UE untuk memperoleh akses pendidikan.

### **2. Management approach**

UE membentuk sebuah kerjasama yang melibatkan beberapa ahli untuk melakukan penelitian terhadap kasus diskriminasi etnis Roma yang ada di Republik Ceko. Tim tersebut terdiri dari beberapa ahli di bidangnya masing-masing seperti peneliti I. Gabal dan P. Visek, *World Bank*, CERGE-EI dan Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja Republik Ceko. Mereka menganalisis mulai dari faktor penyebab diskriminasi hingga merencanakan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi problem etnis Roma di Republik Ceko.

Data dari *World Bank* tahun 2010, yang menjelaskan berbagai keuntungan yang didapatkan jika Republik Ceko dapat menyetarakan hak-hak etnis Roma, salah satunya adalah peningkatan pendapatan Pemerintah Republik Ceko jika etnis Roma mendapatkan lapangan pekerjaan yang setara. (World Bank, 2010)

Pada akhirnya, penelitian yang dilakukan oleh para ahli menghasilkan suatu rancangan yang berisi kebijakan-kebijakan konstruktif untuk menghilangkan praktek diskriminasi terhadap etnis Roma dan menyetarakan hak asasi mereka dengan warga sipil Republik Ceko dan warga UE lainnya. Rancangan tersebut dinamakan *Strategy for Combating Social Exclusion (2011-2015)*.

### **3. Normative approach**

Sebagai organisasi yang memiliki status negara di atas negara, UE memiliki otoritas dan legalitas yang dapat mengontrol perilaku negara anggotanya yaitu Republik Ceko. Pemberian label bersalah dan melanggar ketentuan UE oleh

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa kepada Republik Ceko merupakan bukti bahwa UE telah menggunakan sumber daya otoritas dan legalitasnya dalam kasus diskriminasi tersebut.

Selain itu, UE juga menawarkan solusi berupa pembentukan SCSE kepada Republik Ceko melalui para ahli. Dengan demikian, penggunaan otoritas dan legalitas secara tepat dapat membantu Republik Ceko dalam mematuhi ketentuan UE untuk menyetarakan hak asasi etnis Roma.

Pada sisi lain, peranan negara anggota juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan suatu organisasi internasional. Karena dalam konsep implementasi kebijakan suatu organisasi internasional tidak bisa ditentukan hanya dengan peranan dari institusi itu sendiri, tapi juga harus melibatkan peranan dari negara anggotanya.

Republik Ceko telah berupaya menghilangkan diskriminasi terhadap etnis Roma dengan berbagai cara, salah satunya adalah keterlibatan Republik Ceko dalam *Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015*. partisipasi tersebut diperkuat dengan pembentukan program kebijakan seperti *National Action Plan Social Inclusion (2008 – 2010)*, *Concept of Roma Integration (2010 – 2013)*, dan *National Action Plan Inclusive Education (2010 – 2013)*. Tetapi program-program tersebut gagal dalam menghapus praktek diskriminasi terhadap etnis Roma di Republik Ceko karena program-program tersebut berisi sasaran yang kurang spesifik dan batas waktu implementasinya tidak jelas. (Government of the Czech Republic, 2011)

Kegagalan program-program sebelumnya mengharuskan Republik Ceko membentuk program kebijakan baru yang disebut dengan SCSE. SCSE dibentuk berdasarkan *Government Resolution No. 462* yang dikeluarkan Pemerintah Republik Ceko pada tanggal 14 Juni 2010, dan mulai berlaku dari tahun 2012 sampai 2015. Strategi tersebut berisi langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam mengatasi masalah diskriminasi etnis Roma di Republik Ceko, dan terdiri dari enam kategori utama yaitu *security; housing; education; social services, family, healthcare; employment, benefit systems; dan regional development*. (Office of the Government of the Czech Republic, 2011) Dengan diterapkannya SCSE ke dalam struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya di Republik Ceko maka diharapkan hak asasi etnis Roma akan lebih baik.

Efektivitas dari program kebijakan SCSE terkendala oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu: pertama, Pemerintah Republik Ceko dan NGO yang kesulitan menemukan data tentang jumlah populasi etnis Roma di Republik Ceko karena banyak warga etnis Roma takut didiskriminasi jika mereka menyatakan identitas asli mereka. Akibatnya, data populasi etnis Roma tidak akurat sehingga menyebabkan perhitungan dan perencanaan alokasi dana, jumlah sumber daya yang dibutuhkan menjadi sulit diperkirakan. (Government of the Czech Republic, 2011)

Pada akhirnya, pihak yang mensponsori SCSE terpaksa mengalokasikan dana secukupnya

saja dan tentu hal ini akan menghambat proses integrasi etnis Roma.

Kedua, sumber dana yang tidak jelas. Menurut laporan dari *Council of Europe*, program SCSE masih kurang detail dalam alokasi dana. Ketidakjelasan sumber finansial tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan program SCSE dan pada akhirnya semakin menyengsarakan etnis Roma. (Council of Europe, 2012b)

Ketiga, komitmen Pemerintah dan warga sipil Republik Ceko untuk menyetarakan hak asasi manusia etnis Roma masih kurang. Hal tersebut terbukti ketika pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan Republik Ceko menerapkan tes standardisasi untuk murid kelas 5 dan 9, yang bertujuan untuk mengurutkan sekolah berdasarkan pencapaian prestasi. Sekolah dengan indeks prestasi tinggi akan mendapatkan bantuan finansial dari Pemerintah Republik Ceko. Masalah muncul ketika yang mendapat bantuan tersebut hanya sekolah-sekolah reguler dengan prestasi baik, sedangkan sekolah khusus yang banyak dihuni murid etnis Roma tidak mendapatkan bantuan. (Council of Europe, 2012b)

Selain itu, kualitas para anggota parlemen terutama dari pihak Senat Republik Ceko meragukan. Hal tersebut ditandai dengan hasil pemilihan umum pada Mei 2010 yang banyak membawa politikus yang minim pengalaman bekerja di bidang legislatif sehingga Republik Ceko lambat dalam merespons kebijakan Traktat Lisbon. (Kral, Bartovic, 2010: 42)

Integrasi UE yang telah didengungkan selama ini harus terkendala akibat adanya disintegritas antara Republik Ceko sebagai negara anggota UE dengan etnis Roma sebagai warga negara UE.

Dengan demikian, program SCSE tidak efektif dalam menyelesaikan kasus diskriminasi yang ada di Republik Ceko dan perlu dikaji ulang. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan demikian, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi diskriminasi dalam skala yang lebih besar dan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.

## E. KESIMPULAN

Diskriminasi yang dilakukan oleh Republik Ceko terhadap etnis Roma bertentangan dengan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang terkandung dalam Traktat Lisbon. Bentuk dari perlakuan diskriminatif tersebut beragam, mulai dari aksi demonstrasi anti-Roma, segregasi murid Roma ke dalam sekolah khusus, pembatasan partisipasi politik, pelemparan batu dan bom serta penyiksaan yang berujung pembantaian.

Implementasi Traktat Lisbon dalam melindungi etnis Roma di Republik Ceko terdiri dari 2 variabel, yaitu *Institutional Resources* dan *Domestic Levels*. *Institutional Resources* terdiri dari 3 pendekatan, yaitu *Enforcement Approach* (UE menyatakan Republik Ceko bersalah karena melanggar Pasal 14 dan Pasal 2 Protokol 1 dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa), *Management Approach* (berupa rekomendasi pembentukan *Strategy for Combating Social Exclusion/SCSE*), dan *Normative Approach* (UE

menggunakan otoritas dan legalitasnya untuk mempengaruhi Republik Ceko). Sedangkan dari variabel *Domestic Levels* yaitu Republik Ceko membentuk *Government Resolution No. 462* sebagai dasar pembentukan *Strategy for Combating Social Exclusion*.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aust, Anthony. 2007. *Modern Treaty Law and Practice Second Edition*. New York: Cambridge University Press.
- Joachim, Jutta; Reinalda, Bob; Verbeek, Bertjan. 2008. *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?*. Oxon: Routledge.
- Král, David dan Bartovic, Vladimír. 2010. *The Czech and the Slovak Parliaments after the Lisbon Treaty*. Prague: EUROPEUM Institute for European Policy.
- Perhimpunan Pelajar Indonesia. 2012. *Buku Belajar ke Luar Negeri Seri 1*. Perhimpunan Pelajar Indonesia.
- Stubbs, Sue. 2008. *Inclusive Education Where There are Few Resources*. Oslo: The Atlas Alliance.
- Theodorson, George A, and Achilles G. Theodorson. 1979. *A Modern Dictionary of Sociology*. New York, Hagerstown, San Francisco, London: Barnes & Noble Books.
- Udoji, Chief J.O. 1981. *The African Public Servant As a Public Policy in Africa*. Addis Abeba : African Assosiation for Public Administration and Management.

### Jurnal

- Sinaga, Elvina Chandra; Wiranata, I Made Anom & Dewi, Putu Ratih Kumala. 2015. Upaya Uni Eropa dalam Mempromosikan Integrasi Sosial Etnis Roma di Rumania. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 1. No. 3.

Finnemore, M. dan Sikkink, K. 1998. International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*. Vol. 52 No. 4

Putnam, Robert D. 1988. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*. Vol. 42. No. 3.

Shannon, Vaughn P. 2000. Norms are What States Make of Them: The Political Psychology of Norm Violation. *International Studies Quarterly*. Vol. 44.

### Internet

- Council of Europe. 2002a. *European Convention on Human Rights*. Council of Europe. [serial online] [http://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf) [10 September 2014]
- Council of Europe. 2012b. *D.H. and Others v. Czech Republic*. Council of Europe. [serial online] <http://www.errc.org/cms/upload/file/eighth-communication-to-the-committee-of-ministers-on-judgment-implementation-18-may-2012.pdf> [10 September 2014]
- Government of the Czech Republic. 2011. *Decade of Roma Inclusion 2005-2015*. Government of the Czech Republic. [serial online] <http://www.abstract.lib-ebook.com/a1-other/1470887-1-government-the-czech-republic-june-2011-1-progress-report-2010.php> [10 September 2014]
- Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). 2012. *Equal Access to Quality Education for Roma Children*. Office for Democratic Institutions and Human Rights. [serial online] <http://www.osce.org/odihr/96661?download=true> [10 September 2014]
- Office of the Government of the Czech Republic. 2011. *Strategy for Combating Social Exclusion for the period 2011-2015*. Office of the Government of the Czech Republic. [serial online] <http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vyloucení/strategy-for->

[combating-social-exclusion-for-the-period-2011-2015/download](#) [10 September 2014]

World Bank. 2010. *Roma Inclusion: An Economic Opportunity for Bulgaria, Czech Republic, Romania and Serbia Policy Note*. World Bank. [serial online] <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/12905/696550ESW0P1180Economic0Opportunity.pdf?sequence=1> [10 September 2014]

